

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Sumatera no. 50 Bandung – Indonesia Telp. 62-22 423 7369 Fax. 62-22 423 7081

Website: www.bpmpt@jabarprov.go.id, Email: bpmpt@jabarprov.go.id,



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 disusun dalam rangka pedoman pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan BPMPT Tahun Anggaran 2017.

Rencana Kerja ini berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan *good governance*, serta sebagai sarana meningkatkan kinerja BPMPT secara bertahap dan berkesinambungan.

Pelaksanaan program dan kegiatan BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 dilandasi oleh tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) BPMPT Provinsi Jawa Barat serta Rencana Strategis BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2018.

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu merupakan lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 04 Tahun 2013, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Perijinan serta melaksanakan kewenangan tertentu Pemerintah Provinsi sesuai dengan kebutuhan daerah dan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Gubernur.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, akuntabel dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPMPT Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2017.

Bandung, April 2016 Kepala,

DR. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601217 198511 1 002

Rencana Kerja (RENJA) BPMPT Tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat adalah dokumen rencana pembangunan BPMPT untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Renstra BPMPT dan rancangan awal RKPD serta memperhatikan rancangan awal RKP.

Proses penyusunan Rencana Kerja BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 berawal dari evaluasi program dan kegiatan BPMPT tahun-tahun sebelumnya. Program dan kegiatan yang masih belum optimal dilaksanakan dan belum menunjang pencapaian indikator kinerja baik dalam Renstra BPMPT maupun RKPD dan RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus dilaksanakan secara kontinu dan berkesinambungan. Selain berdasarkan pada evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya Rencana Kerja BPMPT Tahun 2017 juga disusun berdasarkan masukan dari Bidang dan Sekretariat di lingkungan BPMPT serta hasil pelaksanan Forum Organisasi Perangkat Daerah yang melibatkan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menangani masalah promosi, penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu serta 27 (dua puluh tujuh) Perangkat Daerah Kab/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM) dan Pelayanan Perijinan Terpadu se-Jawa Barat.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 dan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 Tahun), memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Renja, serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah dengan memperhatikan dan menyadari keterbatasan sumber daya yang tersedia. Dalam implementasinya ditetapkan prioritas pembangunan daerah yang

terbagi menjadi **common goals** yang memerlukan kegiatan lintas sektor dan sinergitas yang tinggi lintas OPD dan institusi di berbagai tingkatan pemerintahan; dan **non common goals** sebagai kegiatan pendukung yang menjadi tupoksinya OPD guna pencapaian **common goals**.

Selain mengacu kepada RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Barat, Rencana Kerja BPMPT tahun 2017 juga mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) BPMPT Tahun 2015 – 2018. Renja BPMPT merupakan penjabaran pencapaian indikator Renstra BPMPT dalam jangka waktu satu tahun. Renja BPMPT Tahun 2017 juga mengacu kepada Rencana Kerja BKPM RI dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Rencana Kerja (Renja) BPMPT Tahun 2017 merupakan acuan untuk penyusunan RAPBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPMPT Tahun 2017.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Provinsi Jawa Barat BPMPT Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

- dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 02. Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018:
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan RENJA

Maksud penyusunan Renja BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah untuk merumuskan program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja, sesuai dengan tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan

tata kerja Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2017.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja BPMPT adalah sebagai acuan BPMPT dalam mengoperasionalisasikan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian tentang Renja BPMPT, proses penyusunan Renja BPMPT, keterkaitan antara Renja BPMPT dengan dokumen BPMPT, Renstra BPMPT, dengan Renja BKPM serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan BPMPT, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran BPMPT.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BPMPT.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BPMPT, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPMPT TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPMPT Tahun 2015 dan Capaian Renstra BPMPT

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPMPT tahun 2015 dan perkiraan capaian tahun 2016, mengacu pada APBD tahun 2016 dan pencapaian target Renstra

- BPMPT berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD Tahun 2015.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPMPT Menjelaskan capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra BPMPT.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPMPT Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPMPT, dampak terhadap pencapaian misi dan visi kepala daerah, terhadap capaian program nasional serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BPMPT
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Menjelaskan hasil review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan pada BPMPT.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan hasil telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPMPT
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPMPT Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPMPT dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BPMPT
- 3.3. Program dan Kegiatan BPMPT Tahun 2017 Menjelaskan program dan kegiatan BPMPT pada Tahun 2017 yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana.

1-5

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan renja BPMPT, penegasan komitmen BPMPT terhadap pelaksanaan Renstra BPMPT dan RPJMD, serta penegasan Renja OPD sebagai penyusunan RKA BPMPT pada Tahun 2017.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPMPT TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPMPT Tahun 2015 dan Capaian Renstra BPMPT

Pada pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 telah diperoleh berbagai gambaran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, yang merupakan implementasi dari kebijakan operasional rencana strategis.

Dalam rangka mewujudkan tujuan misi **Misi Kedua** pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan, dalam rangka mewujudkan perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, telah ditetapkan sasaran yang harus dicapai pada pelaksanaan pembangunan untuk Tahun 2015, yang meliputi :

- 1. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing;
- 2. Tersedianya bahan rumusan kebijakan yang mendorong perbaikan iklim penanaman modal;
- 3. Meningkatnya efektifitas promosi dan kerjasama investasi;
- 4. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing;
- 5. Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Pelaksanaan Program Misi Kedua Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut kemudian ditindaklanjuti ke dalam Misi Kesatu BPMPT, yaitu meningkatnya realisasi investasi di Jawa Barat dengan sasaran strategis meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat.

Sedangkan dalam pelaksanaan Program pada Misi Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik, yang bertujuan mewujudkan Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang

ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis Kabupaten/Kota dengan manajemen lintas Kabupaten/Kota, telah ditetapkan sasaran yang direncanakan dicapai pada pelaksanaan pembangunan selama tahun 2015, yaitu :

- Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perizinan BPMPT Provinsi Jawa Barat;
- Meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan aparatur penanaman modal;
- 3. Terwujudnya optimalisasi kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan;
- 4. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Untuk merealisasikan kesembilan sasaran tersebut diatas telah dilaksanakan 11 (sebelas) program yang ditunjang 25 (dua puluh lima) kegiatan yaitu :

- 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah:
- 2. Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi
- Program Pengembangan Komunikasi, informasi, Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi
- 4. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah
- 5. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
- 6. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur;
- 7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
- 9. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 11. Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah

Dalam meralisasikan tujuan dan sasaran dari kedua misi di atas, telah dilaksanakan 11 (sebelas) program yang ditunjang 25 (dua puluh lima) buah kegiatan, dengan pelaksanaan kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pelaksanaan Kinerja BPMPT Tahun Anggaran 2015

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
140.	TROSIGNIJALOIATAN	(Rp.)	Rp.	%
1	2	3	4	5
I	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah	1.147.115.000,00	1.026.381.000,00	97,6
1	Perencanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan	1.147.115.000,00	1.119.613.600,00	97,6
II	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	8.400.859.925,00	7.796.140.360,00	92,8
1	Forum Interaksi Investor Jawa Barat	500.000.000,00	488.454.450,00	97,7
2	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PMA/PMDN	600.000.000,00	556.517.760,00	92,8
3	Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	775.000.000,00	741.667.600,00	95,7
4	Pelaksanaan Kerjasama Investasi	350.000.000,00	347.661.950,00	99,3
5	Penyusunan Profil Peluang Investasi di Jawa Barat	600.000.000,00	570.620.800,00	95,1
6	Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi	4.868.634.925,00	4.388.190.700,00	90,1
7	Sosialisasi Pelayanan Perijinan di Jawa Barat	707.225.000,00	703.027.100,00	99,4
ш	Program Pengembangan Komunikasi, informasi, media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi	132.000.000,00	128.670.000,00	97,5
1	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan secara Online	132.000.000,00	128.670.000,00	97,5
IV	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	3.834.193.000,00	1.851.324.000,00	91,3
1	Penyelenggaraan Administrasi Perizinan pada Objek Perizinan di Lapangan	1.983.248.000,00	1.851.324.000,00	93,4
2	Forum Sinergitas Tim Teknis Perizinan	80.750.000,00	78.212.000,00	98,7
3	Updating Persyaratan Perizinan	149.725.000,00	136.485.510,00	91,2
4	Layanan Perizinan di Gerai dan Layanan Site Mobile Service (SMS	850.000.000,00	737.435.500,00	86,8
5	Pengelolaan dan Publikasi Database Perizinan	80.000.000,00	78.605.000,00	98,3
6	Evaluasi Pelayanan Perizinan Terpadu	451.800.000,00	382.433.000,00	84,7
7	Monitoring Pelayanan Perizinan Terpadu	238.670.000,00	234.783.000,00	98,4
V	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	477.800.000,00	459.822.094,00	96,2

NO.	DD CCD AM /// ECTATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	(Rp.)	Rp.	%
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kemampuan Aparatur pada BPMPT	477.800.000,00	459.822.094,00	96,2
VI	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	1.005.738.000,00	948.818.922,00	94,3
1	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur	1.005.738.000,00	948.818.922,00	94,3
VII	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.707.224.000,00	4.469.558.466,00	94,9
1	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	4.707.224.000,00	4.469.558.466,00	94,9
VII I	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.032.663.150,00	1.953.535.294,00	96,1
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	2.003.463.150,00	1.953.535.294,00	97,5
2	Jasa Konsultansi Penyusunan DED pada BPMPT	29.200.000,00	-	-
IX	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.620.020.000,00	2.504.501.979,00	95,6
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.620.020.000,00	2.504.501.979,00	95,6
x	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	150.000.000,00	150.000.000,00	100
1	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	150.000.000,00	150.000.000,00	100
ΧI	Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah	1.000.000.000,00	953.403.250,00	95,3
1	Pembinaan dan Pendataan Penanaman Modal di Daerah Provinsi Jawa Barat	500.000.000,00	470.390.000,00	94,1
2	Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi/Statistik Penanaman Modal	500.000.000,00	483.013.250,00	96,6
	JUMLAH	25.507.613.075,00	23.983.341.975,00	97,4

Pada Tahun Anggaran 2015 kinerja yang telah dicapai BPMPT dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Kegiatan Forum Interaksi Investor *Output* kegiatan terlaksananya forum komunikasi pelaku usaha, terlaksananya matchmaking antar pelaku usaha.
- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PMA/PMDN,
 Output kegiatan adalah terlaksananya pembinaan dan pengendalian perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat, terlaksananya Task Force

- penanganan permasalahan PMA/PMDN di Jawa Barat, terlaksananya penilaian perusahaan dan pembina PMA/PMDN terbaik di Jawa Barat.
- 3. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal, *Output* kegiatan adalah tersusunnya dokumen rancangan penyusunan potensi peluang investasi, partisipasi Jawa Barat pada kegiatan MPU, terlaksananya forum koordinasi kebijakan penanaman modal, terlaksananya forum perencanaan pengembangan penanaman modal, tersusunnya kajian pemberian insentif dan kemudahan bidang penanaman modal.
- 4. Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Investasi, *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan kerjasama investasi, tersusunya bahan promosi investasi kerjasama 2 Provinsi (Jabar dan Kaltim)
- Kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi Jawa Barat, Output kegiatan adalah tersusunnya profil peluang investasi sektor pertanian dan peternakan
- 6. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi, *Output* kegiatan adalah terlaksananya partisipasi Jawa Barat pada event Balikpapan Fair, Batam Expo, Pameran Pekan Inovasi Sumut, Pameran Inafact Bali, Inafact Makassar, Pameran MITTEX di Malang, Kalimantan Expo, Gelar Potensi Investasi Daerah, Pekan Raya Jakarta, Promosi Investasi Jawa Barat di Dubai (Asia Barat), Asia Tenggara (Vietnam) serta Eropa, serta Fasilitasi dan Operasionalisasi Jawa Barat Center di Batam
- 7. Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Di Jawa Barat, *Output* kegiatan adalah terlaksananya talkshow sosialisasi perijinan, terlaksananya iklan layanan masyarakat perijinan di Jawa Barat, terlaksananya pencetakan bahan sosialisasi perijinan
- 8. Kegiatan Pengembangan Aplikasi *Sistem* Informasi Pengelolaan Perijinan Secara Online, *Output* kegiatan adalah tersedianya aplikasi dan database perizinan secara online
- Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Permohonan Perizinan pada Objek Perizinan di Lapangan, *Output* kegiatan adalah terlaksananya peninjauan lapangan untuk seluruh sektor perizinan.
- Kegiatan Forum Sinergitas Tim Teknis Perizinan, *Output* kegiatan adalah terlaksananya FGD Sinergitas Tim Teknis Perizinan
- 11. Kegiatan Updating Persyaratan Perizinan, **Output** kegiatan adalah terlaksananya updating dan legalisasi persyaratan perizinan

- 12. Kegiatan Layanan Perizinan di Gerai dan Layanan Site Mobile Service (SMS), Output kegiatan adalah terselenggaranya operasional pelayanan perizinan pada BPMPT yang profesional, akuntabel, normatif, transparan, andal dan santun
- 13. Kegiatan Pengelolaan dan Publikasi database Perizinan, **Output** kegiatan adalah tersedianya aplikasi dan handout perizinan
- 14. Kegiatan Evaluasi Pelayanan Perizinan Terpadu, **Output** kegiatan adalah terlaksananya survey Indeks Kepuasan Masyarakat
- 15. Kegiatan Monitoring Pelayanan Perizinan Terpadu, **Output** kegiatan adalah terlaksananya monitoring pelayanan perizinan terpadu
- 16. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur pada BPMPT, *Output* kegiatan adalah tersedianya uang saku seminar, lokakarya, sosialisasi, rapat kerja, rapat koordinasi, diseminasi, diklat, bimbingan teknis, tersedianya biaya pendaftaran kursus singkat/pelatihan
- 17. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur, *Output* kegiatan adalah terlaksananya kegiatan training for succes, terlaksananya belanja obat-obatan, terlaksananya general check up, tersedianya anggaran untuk sewa lapangan olahraga, terlaksananya pembelian seragam BPMPT dan seragam olahraga.
- 18. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran, *Output* kegiatan adalah penyediaan administrasi perkantoran berupa ATK, telepon, listrik, internet, dokumentasi kegiatan kedinasan, cetakan formulir-formulir dan penggandaan/fotocopy, materai, spanduk, isi tabung gas, isi air kemasan dan galon, surat kabar, pengiriman surat dan majalah, sewa meja dan kursi, belanja makan minum rapat dan tamu serta belanja perjalanan dinas.
- 19. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantoran, *Output* kegiatan adalah penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai, antara lain: honor panitia pengadaan barang dan jasa, kursi kerja staf, *proyektor/in focusl* alat teleconference, CCTV, mesin penghancur kertas, rak arsip, filling cabinet, AC, papan nama, vacum cleaner, komputer, note book tablet, printer, monitor display, modem internet, meja staf, terlaksananya belanja perlengkapan kantor, peralatan kantor, pengadaan komputer, pengadaan meubeulair, peralatan dapur, alat-alat komunikasi, pengadaan penerangan jalan taman, pengadaan konstruksi.

- 20. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, *Output* kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana kantor, tersedianya biaya jasa kebersihan, terrsedianya biaya jasa keamanan, tersedianya biaya bahan bakar, tersedianya biaya perawatan kendaraan bermotor dan perpanjangan STNK
- 21. Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, *Output* kegiatan adalah penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, tersusunnya RKT 2015, DPA 2015, DPPA 2015, RKA 2016, LAKIP 2015, Perjanjian Kinerja 2015, bahan LKPJ dan LPPD 2015, Renja 2016.
- 22. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan, *Output* kegiatan adalah terlaksananya Forum Sinergitas Kelembagaan Penanaman Modal; tersusunnya Renstra BPMPT Provinsi Jawa Barat; tersusunnya Profil BPMPT Provinsi Jawa Barat, tersusunnya SOP BPMPT Provinsi Jawa Barat; terlaksananya keikutsertaan BPMPT pada kegiatan Pra Musrenbang, Musrenbang dan Musrenbangnas; KP3MN di Surabaya, Sosialisasi Program Kegiatan BKPM di Padang; terlaksananya evaluasi dan monitoring program/kegiatan penanaman modal.
- 23. Kegiatan Pembinaan dan Pendataan Penanaman Modal di Daerah Provinsi Jawa Barat, *Output* kegiatan adalah terlaksananya identifikasi perkembangan perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten/Kota di Jawa Barat, terlaksananya pengumpulan data minat dan realisasi investasi PMA/PMDN di Jawa Barat.
- 24. Kegiatan Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi Statistik Penanaman Modal, *Output* kegiatan adalah tersusunnya kajian minat dan realisasi investasi PMA/PMDN di Jawa Barat, tersusunnya perkembangan minat dan realisasi investasi PMA/PMDN di Jawa Barat, terlaksananya konsolidasi pengumpulan dan pengolahan data perkembangan minat dan realisasi PMA/PMDN ke Provinsi lain

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPMPT Tahun 2015 – 2018 kinerja yang telah dicapai BPMPT sampai dengan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPMPT dan Pencapaian Renstra BPMPT s/d Tahun 2015

		Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Realisasi Target Kinerja Hasil		lisasi Kinerja Progi n Tahun lalu (2015)		Target Program dan	Perkiraan Realis Target Renstra SK 2018	PD s/d Tahun
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014	Target Renja SKPD Tahun 2015	Realisasi Renja SKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)	Kegiatan (Renja SKPD 2016)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I	Bidang Penanaman Modal									
1	Program Peningkatan Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi PMA & PMDN	Rp. 154 Trilyun	Rp. 108,9 Trilyun	Rp. 107,79 Trilyun	Rp. 121,52 Trilyun	112,7	Rp. 121,8 Trilyun	Rp. 121,52 Trilyun	78,9
2	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	78,96	80	77,06	96,3	80	77,6	95,13

Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, terlihat bahwa capaian Renstra BPMPT Provinsi Jawa Barat telah mencapai rata-rata di atas 75 % malahan ada yang sudah mencapai diatas 95 %.

Untuk indikator kinerja jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN dari target akhir Renstra sebesar Rp. 154 Trilyun telah terealisasi sebesar Rp. 121,52 Trilyun atau telah mencapai target sebesar 78,9 %, sedangkan untuk indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari target sebesar 81 pada akhir Renstra telah tercapai sebesar 77,06 atau telah mencapai target sebesar 95,13 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPMPT

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi **BPMPT** yaitu menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal perijinan terpadu, menyelenggarakan koordinasi, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu meliputi aspek pelayanan perijinan, sosialisasi dan promosi, penanaman modal dan pengendalian investasi. Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas badan, BPMPT Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan perijinan terpadu;
- penyelengaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu;
- penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang penanaman modal dan perijinan terpadu; dan
- penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu

Sesuai dengan tugas pokok fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada BPMPT lebih difokuskan pada promosi yang dilaksanakan BPMPT sehingga akan meningkatkan citra positif Jawa Barat di mata investor baik dalam maupun luar negeri. Selain itu kinerja BPMPT juga diukur dari peningkatan realisasi investasi di Jawa Barat setiap tahunnya, baik itu dari segi prosentase kenaikan realisasi investasi dari tahun ke tahun, jumlah nilai

investasi, jumlah lapangan usaha/proyek serta penyerapan jumlah tenaga kerja. Kinerja BPMPT Provinsi Jawa Barat juga dapat diukur dari pelayanan yang diberikan kepada investor dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dalam merealisasikan investasinya di Jawa Barat. Tolak ukur kinerja lainnya adalah dalam pelayanan perijinan yang diberikan kepada investor.

Hasil kinerja pelayanan BPMPT Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018 dapat dilihat dalam tabel 2.3 di bawah ini.



No.	Indikator	SPM/ Standar	IKK		Target Re	nstra SKPD			Realisasi	Capaian		Catatan
INO.	1 2	Nasional	INN	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th.2017	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Realisasi Investasi PMA & PMDN	N/A	N/A	85,55	95,81	107,79	121,80	108,89	121,51	143,04	-	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	N/A	N/A	80	79	80	78,96	77,06	76,4	-	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPMPT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah digariskan dalam Pergub Nomor 21 Tahun 2015, BPMPT sebagai lembaga yang ditugasi untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang promosi, penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu mempunyai tugas yang cukup berat yaitu berusaha menarik investasi sebesar-besarnya ke wilayah Jawa Barat. Investasi mutlak diperlukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengingat perannya yang dominan dalam pembangunan ekonomi daerah, selain memberikan efek pengganda (multiplier) pada pertumbuhan pendapatan daerah, penanaman modal dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat di lokalitas dimana investasi tersebut ditanam.

Walaupun Jawa Barat memliki letak yang strategis karena kedekatan dengan Jakarta sebagai ibukota Negara juga memiliki potensi yang cukup sehingga Jawa Barat sampai saat ini masih tercatat sebagai daerah dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia setelah DKI Jakarta. Namun letak strategis dan banyaknya potensi yang dimiliki Jawa Barat untuk dipromosikan kepada investor tidak secara langsung memudahkan BPMPT Provinsi Jawa Barat dalam menarik investasi sebesar-besarnya ke Jawa Barat. Banyak hambatan yang harus dihadapi dalam mewujudkan kenaikan realisasi investasi di Jawa Barat yang merupakan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPMPT Provinsi Jawa Barat.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPMPT Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat antara lain adalah :

- Jaminan keamanan dan kepastian hukum;
- b. Infrastruktur pendukung investasi yang kurang mendukung;
- c. Ketepatan waktu perijinan;
- d. Kepastian dan ketepatan biaya perijinan;
- e. Peraturan/ketentuan tentang penanaman modal;
- f. Fasilitasi investor;
- g. Profil dan peluang investasi;
- h. Pembinaan terhadap pelaku usaha;
- i. Sarana promosi investasi;
- Kerja sama investasi antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta dan swasta dengan swasta.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2017 yang tengah disusun Bappeda Provinsi Jawa Barat, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2017 sebagian besar telah dapat menjawab isu-isu penting yang dihadapi BPMPT untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta untuk meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat.

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2017, BPMPT Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan program wajib bidang statistik, program wajib bidang otonomi daerah, program wajib bidang komunikasi dan informatika, program wajib penanaman modal dan program wajib bidang perencanaan pembangunan.

Program yang dilaksanakan pada program wajib bidang statistik adalah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan kegiatan :

- a. Pembinaan dan Pendataan Penanaman Modal di Daerah Provinsi Jawa
 Barat;
- b. Pengelolaan dan Publikasi Data Base Perijinan.

Program yang dilaksanakan pada program wajib bidang otonomi daerah adalah Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan kegiatan :

- a. Evaluasi dan Monitoring dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Permohonan Perijinan pada Objek
 Perijinan di Lapangan;
- c. Forum Sinergitas Tim Teknis Perijinan;
- d. Updating Persyaratan Perjinan Fasilitasi Pelayanan Perjinan;
- e. Fasilitasi Pelayanan Perijinan di 4 Gerai dan Layanan SMS.

Program yang dilaksanakan pada program wajib bidang komunikasi dan informatika adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan kegiatan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Perijinan Secara Online

Program yang dilaksanakan pada program wajib penanaman modal adalah Program Peningkatan Investasi Daerah terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu :

- a. Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Poromosi dan Kerjasama Investasi;
- b. Sosialisasi Pelayanan Perijinan di Jawa Barat;
- c. Penyusunan Profil Peluang Investasi di Jawa Barat;
- d. Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal;
- e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Program yang dilaksanakan pada program wajib bidang perencanaan pembangunan adalah Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan dengan kegiatan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Penanaman Modal dan Perijinan.

Rancangan awal RKPD Tahun 2017 BPMPT Provinsi Jawa Barat secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



BPMPT Provinsi Jawa Barat

		Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
55	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi					Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi							
1	Pembuatan sistem informasi penanaman modal dan PTSP dan updating website	Bandung	Tersedianya aplikasi/software system informasi Penanaman Modal dan PTSP	1 aplikasi	200.000.000	Pembuatan sistem informasi penanaman modal dan PTSP dan updating website	Bandung	Tersedianya aplikasi/software system informasi Penanaman Modal dan PTSP	1 aplikasi	200.000.000			
61	Program Peningkatan Investasi Daerah					Program Peningkatan Investasi Daerah							
2	Penyusunan blue list investasi Jawa Barat	Bandung	Tersedianya dokumen blue list investasi Jawa Barat	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan blue list investasi Jawa Barat	Bandung	Tersedianya dokumen blue list investasi Jawa Barat	2 Dokumen	750.000.000			
3	Pembuatan aplikasi dan database spasial potensi peluang investasi	Bandung	Tersedianya Aplikasi dan database spasial potensi peluang investasi	1 aplikasi	100.000.000	Pembuatan aplikasi dan database spasial potensi peluang investasi	Bandung	Tersedianya Aplikasi dan database spasial potensi peluang investasi	1 aplikasi	100.000.000			
4	Penyusunan dokumen green list investasi berdasarkan per wilayah pengembangan	Kota Bandung	Tersedianya Dokumen Green List Investasi	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan dokumen green list investasi berdasarkan per wilayah pengembangan	Kota Bandung	Tersedianya Dokumen Green List Investasi	1 Dokumen	1.000.000.000			

Penyusunan dan

pembuatan bahan

Kota

Bandung

Tersedianya bahan

promosi (desain dan

barang cetak)

1 Paket

100.000.000

Kota

Bandung

Tersedianya bahan

barang cetak)

promosi (desain dan

1 Paket

100.000.000

Penyusunan dan

pembuatan bahan

			Rancangan Awal RKPD				H	asil Analisis Kebutuhan			
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	promosi (Desain dan cetak)					promosi (Desain dan cetak)					
14	Pelaksanaan event promosi dalam negeri (PRJ, IIICE, Indonesia Investment Week, dan Kalimantan)I	DKI Jakarta, Kalimanta n	Jumlah event	4 kali	900.000.000	Pelaksanaan event promosi dalam negeri (PRJ, IIICE, Indonesia Investment Week, dan Kalimantan)I	DKI Jakarta, Kalimanta n	Jumlah event	4 kali	900.000.000	
15	Pelaksanaan event promosi luar negeri (Eropa dan Asia)	Eropa dan Asia	Jumlah event	4 kali	1.130.000.000	Pelaksanaan event promosi luar negeri (Eropa dan Asia)	Eropa dan Asia	Jumlah event	4 kali	1.630.000.000	
16	Pelaksanaan Kerjasama sister province dengan Australia Selatan	Kota Bandung, Jawa Barat	Terlaksananya sister province dengan Australia Selatan	1 kali	400.000.000	Pelaksanaan Kerjasama sister province dengan Australia Selatan	Kota Bandung, Jawa Barat	Terlaksananya sister province dengan Australia Selatan	1 kali	400.000.000	
17	Pembuatan Film West Java in Brief	Kota Bandung	Terselesaikannya Film West Java in Brief	1 paket	75.000.000	Pembuatan Film West Java in Brief	Kota Bandung	Terselesaikannya Film West Java in Brief	1 paket	75.000.000	
18	Pembuatan Cinderamata promosi investasi dalam dan luar negeri	Kota Bandung	Tersedianya cinderamata promosi	1 paket	100.000.000	Pembuatan Cinderamata promosi investasi dalam dan luar negeri	Kota Bandung	Tersedianya cinderamata promosi	1 paket	100.000.000	
19	Sewa gedung dan Operasionalisasi JBC	Batam	Tersedianya gedung JBC	12 bulan	800.000.000	Sewa gedung dan Operasionalisasi JBC	Batam	Tersedianya gedung JBC	12 bulan	800.000.000	
20	Pembayaran gaji pengelola JBC	Batam	Terpenuhinya gaji pengelola JBC	4 Org/ 12 bulan	250.000.000	Pembayaran gaji pengelola JBC	Batam	Tersedianya gaji pengelola JBC	4 Org/ 12 bulan	250.000.000	
21	Pembuatan dekorasi JBC	Batam	Terlaksananya pembuatan dekorasi JBC	1 kali	100.000.000	Pembuatan dekorasi JBC	Batam	Terlaksananya pembuatan dekorasi JBC	1 kali	100.000.000	
22	Publikasi Investasi Kawasan Geopark Ciletuh	Kota Bandung, Jawa Barat	Terlaksananya publikasi melalui media audio visual, media social, iklan	5 paket	500.000.000	Publikasi Investasi Kawasan Geopark Ciletuh	Kota Bandung, Jawa Barat	Terlaksananya publikasi melalui media audio visual, media social, iklan	5 paket	500.000.000	

	7	ъ.
•		ы
		ĸ.
T)	н	œ۷

			Rancangan Awal RKPD				Н	asil Analisis Kebutuhan			
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			layanan masyarakat dan talk show					layanan masyarakat dan talk show			
23	Pembinaan PMA/PMDN akan kewajiban LKPM	Kota Bandung	Terwujudnya pembinaan PMA/PMDN akan kewajiban LKPM	800 perusahaan, 121,8 T Rupiah	240.000.000	Pembinaan PMA/PMDN akan kewajiban LKPM	Kota Bandung	Terwujudnya pembinaan PMA/PMDN akan kewajiban LKPM	800 perusahaan, 121,8 T Rupiah	240.000.000	
24	Pelaksanaan pengawasan proyek investasi	27 Kab/Kota di Jawa Barat	Terealisasinya laporan pelaksanaan pengawasan proyek investasi untuk 150 proyel/perusahaan	150 proyek / perusahaan	500.000.000	Pelaksanaan pengawasan proyek investasi	27 Kab/Kota di Jawa Barat	Terealisasinya laporan pelaksanaan pengawasan proyek investasi untuk 150 proyel/perusahaan	150 proyek / perusahaan	500.000.000	
25	Penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal	Kota Bandung	Tersusunnya dokumen laporan dan rekomendasi hasil penanganan permasalahan penanaman modal dan perizinan	300 perusahaan	400.000.000	Penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal	Kota Bandung	Tersusunnya dokumen laporan dan rekomendasi hasil penanganan permasalahan penanaman modal dan perizinan	300 perusahaan	400.000.000	
62	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
26	Pembuatan bahan/data dan cetakan sosialisasi pelayanan	Kota Bandung	Tersedianya bahan dan dokumen data untuk sosialisasi pelayanan perizinan	4 paket	185.000.000	Pembuatan bahan/data dan cetakan sosialisasi pelayanan	Kota Bandung	Tersedianya bahan dan dokumen data untuk sosialisasi pelayanan perizinan	4 paket	185.000.000	
27	Pembuatan/produksi audio visual untuk ILM di radio dan TV	Kota Bandung	Terselenggaranya ILM mengenai pelayanan perizinan Prov.Jabar di radio dan TV	1 paket	125.000.000	Pembuatan/produksi audio visual untuk ILM di radio dan TV	Kota Bandung	Terselenggaranya ILM mengenai pelayanan perizinan Prov.Jabar di radio dan TV	1 paket	125.000.000	
28	Pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan	Kota Bandung	Tersedianya Cetakan bahan sosialisasi (Leaflet, Brosur, dll)	1 paket	250.000.000	Pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan	Kota Bandung	Tersedianya Cetakan bahan sosialisasi (Leaflet, Brosur, dll)	1 paket	250.000.000	
29	Pelaksanaan monitoring proses penerbitan perizinan	27 Kab./Kota di Jawa Barat	Tersusunnya Dokumen Laporan hasil monitoring	120 objek	100.000.000	Pelaksanaan monitoring proses penerbitan perizinan	27 Kab./Kota di Jawa Barat	Tersusunnya Dokumen Laporan hasil monitoring	120 objek	100.000.000	



			Rancangan Awal RKPD				На	asil Analisis Kebutuhan			
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			proses penerbitan perizinan					proses penerbitan perizinan			
30	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	27 Kab./Kota di Jawa Barat	Tersusunnya Dokumen laporan hasil survey kepuasan masyarakat	4 kali / 180 Responden	150.000.000	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	27 Kab./Kota di Jawa Barat	Tersusunnya Dokumen laporan hasil survey kepuasan masyarakat	4 kali / 180 Responden	150.000.000	
31	Pelaksanaan Pengawasan pasca penerbitan perizinan	27 Kab./Kota di Jawa Barat	Tersusunnya dokumen evaluasi penyelenggaraan perizinan	1 dokumen	150.000.000	Pelaksanaan Pengawasan pasca penerbitan perizinan	27 Kab./Kota di Jawa Barat	Tersusunnya dokumen evaluasi penyelenggaraan perizinan	1 dokumen	150.000.000	
32	Penyusunan dokumen ISO 9001 - 2015 penyelenggaraan pelayanan perizinan	Kota Bandung	Tersusunnya Dokumen manajemen ISO 9001 - 2008 untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan	1 dokumen	80.000.000	Penyusunan dokumen ISO 9001 - 2015 penyelenggaraan pelayanan perizinan	Kota Bandung	Tersusunnya Dokumen manajemen ISO 9001 - 2008 untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan	1 dokumen	80.000.000	
33	Pelaksanaan peninjauan lapangan bersama Tim Teknis Bid. Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial	27 Kab./Kota di Jawa Barat	Jumlah Dokumen Laporan/berita acara hasil pemeriksaan dan peninjauan lapangan	1000 kali	1.000.000.000	Pelaksanaan peninjauan lapangan bersama Tim Teknis Bid. Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial	27 Kab./Kota di Jawa Barat	Tersusunnya Dokumen Laporan/berita acara hasil pemeriksaan dan peninjauan lapangan	1000 kali	1.000.000.000	
34	Pelaksanaan peninjauan lapangan bersama Tim Teknis Bid. Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	27 Kab./Kota di Jawa Barat	Jumlah Dokumen Laporan/berita acara hasil pemeriksaan dan peninjauan lapangan	1000 kali	1.000.000.000	Pelaksanaan peninjauan lapangan bersama Tim Teknis Bid. Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	27 Kab./Kota di Jawa Barat	Tersusunnya Dokumen Laporan/berita acara hasil pemeriksaan dan peninjauan lapangan	1000 kali	1.000.000.000	
35	Pelaksanaan rapat tim teknis untuk kajian teknis Bid. Pelayanan	Kota Bandung	Jumlah Dokumen Laporan hasil rapat tim teknis	100 kali	100.000.000	Pelaksanaan rapat tim teknis untuk kajian teknis Bid. Pelayanan	Kota Bandung	Jumlah Dokumen Laporan hasil rapat tim teknis	100 kali	100.000.000	
36	Pelaksanaan rapat tim teknis untuk kajian teknis Bid.	Kota Bandung	Jumlah Dokumen Laporan hasil rapat tim teknis	100 kali	100.000.000	Pelaksanaan rapat tim teknis untuk kajian teknis Bid.	Kota Bandung	Jumlah Dokumen Laporan hasil rapat tim teknis	100 kali	100.000.000	

			Rancangan Awal RKPD				н	asil Analisis Kebutuhan			
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam					Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam					
37	Pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis Bid. Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial	Kota Bandung	Tersusunnya Dokumen Laporan hasil rapat koordinasi tim teknis perizinan	1 kali	50.000.000	Pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis Bid. Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial	Kota Bandung	Tersusunnya Dokumen Laporan hasil rapat koordinasi tim teknis perizinan	1 kali	50.000.000	
38	Pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis Bid. Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Kota Bandung	Tersusunnya Dokumen Laporan hasil rapat koordinasi tim teknis perizinan	1 kali	50.000.000	Pelaksanaan rapat koordinasi tim teknis Bid. Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Kota Bandung	Tersusunnya Dokumen Laporan hasil rapat koordinasi tim teknis perizinan	1 kali	50.000.000	
39	Penyusunan updating persyaratan izin Bid. Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial	Kota Bandung	Jumlah Dokumen persyaratan izin untuk 9 sektor (updating)	9 Dokumen	40.000.000	Penyusunan updating persyaratan izin Bid. Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial	Kota Bandung	Jumlah Dokumen persyaratan izin untuk 9 sektor (updating)	9 Dokumen	40.000.000	
40	Penyusunan updating persyaratan izin Bid. Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Kota Bandung	Jumlah Dokumen persyaratan izin untuk 12 sektor (updating)	12 Dokumen	40.000.000	Penyusunan updating persyaratan izin Bid. Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Kota Bandung	Jumlah Dokumen persyaratan izin untuk 12 sektor (updating)	12 Dokumen	40.000.000	
41	Penyelenggaraan layanan perizinan di gerai	4 wilayah BKPP	Jumlah permohonan di 4 gerai selama 12 bln	4 gerai,12 Bulan; 350 pemohon /bulan	240.000.000	Penyelenggaraan layanan perizinan di gerai	4 wilayah BKPP	Jumlah permohonan di 4 gerai selama 12 bln	4 gerai, 12 Bulan; 350 pemohon/bu lan	240.000.000	
42	Penyelenggaraan layanan perizinan SMS (Site Mobile Service)	27 Kab./Kota di Jawa Barat	Jumlah Pelayanan perizinan melalui SMS (Site Mobile Service)	96 kali, 8 Jenis izin	300.000.000	Penyelenggaraan layanan perizinan SMS (Site Mobile Service)	27 Kab./Kota di Jawa Barat	Jumlah Pelayanan perizinan melalui SMS (Site Mobile Service)	96 kali, 8 Jenis izin	300.000.000	
65	Program Pengembangan					Program Pengembangan					

			Rancangan Awal RKPD				н	asil Analisis Kebutuhan			
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Data/Informasi/Stat istik Daerah					Data/Informasi/Stat istik Daerah					
43	Pengumpulan data realisasi perizinan dan penyerapan tenaga kerja	27 Kab/Kota	Tersusunnya Dokumen/laporan data realisasiperizinan dan penyerapan tenaga kerja	1 Dokumen	650.000.000	Pengumpulan data realisasi perizinan dan penyerapan tenaga kerja	27 Kab/Kota	Tersusunnya Dokumen/laporan data realisasiperizinan dan penyerapan tenaga kerja	1 Dokumen	650.000.000	
44	Evaluasi data dan pelaporan investasi dan perizinan	27 Kab/Kota	Tersusunnya Dokumen/laporan Pemantauan dan pelaporan	1 Dokumen	150.000.000	Evaluasi data dan pelaporan investasi dan perizinan	27 Kab/Kota	Tersusunnya Dokumen/laporan Pemantauan dan pelaporan	1 Dokumen	150.000.000	
98	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					
45	Forum OPD BPMPT	Kota Bandung	Terselenggaranya Forum OPD BPMPT dan dokumen laporan hasil forum OPD	1 kali, 1 Dokumen	200.000.000	Forum OPD BPMPT	27 Kab/Kota	Terselenggaranya Forum OPD BPMPT dan dokumen laporan hasil forum OPD	1 kali, 1 Dokumen	200.000.000	
46	Forum Perencanaan Tingkat Daerah (Pra Musrenbang, Musrenbang, Musrenbangnas, Pertemuan regional dan nasional)	Jawa Barat dan nasional	Jumlah laporan hasil Partisipasi/ keikutsertaan dalam forum perencanaan tingkat regional dan nasional	8 kali	200.000.000	Forum Perencanaan Tingkat Daerah (Pra Musrenbang, Musrenbang, Musrenbangnas, Pertemuan regional dan nasional)	Jawa Barat dan nasional	Jumlah laporan hasil Partisipasi/ keikutsertaan dalam forum perencanaan tingkat regional dan nasional	8 kali	200.000.000	
47	Monitoring dan Evaluasi program/ kegiatan BPMPT	Kota Bandung	Tersusunnya Laporan hasil evaluasi program/ kegiatan	12 Bulan	125.000.000	Monitoring dan Evaluasi program/ kegiatan BPMPT	Kota Bandung	Tersusunnya Laporan hasil evaluasi program/ kegiatan	12 Bulan	125.000.000	
48	Penyusunan dokumen perencanaan 2018	Kota Bandung	Tersusunnya Dokumen perencanaan (Renstra, RKPD, Renja, Pra RKA, RKA, DPA)	10 Dokumen	75.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan 2018	Kota Bandung	Tersusunnya Dokumen perencanaan (Renstra, RKPD, Renja, Pra RKA, RKA, DPA)	10 Dokumen	75.000.000	

			Rancangan Awal RKPD				Н	asil Analisis Kebutuhan			
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Pameran LKPJ	Kota Bandung	Terselenggaranya Event Pameran LKPJ	1 kali	50.000.000	Pameran LKPJ	Kota Bandung	Terselenggaranya Event Pameran LKPJ	1 kali	50.000.000	
100	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah					Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah					
50	Penatausahaan keuangan dan aset daerah	Kota Bandung	Tersusunnya Dokumen/laporan Penatausahaan keuangan dan aset daerah menggunakan SIPKD	12 Dokumen	100.000.000	Penatausahaan keuangan dan aset daerah	Kota Bandung	Tersusunnya Dokumen/laporan Penatausahaan keuangan dan aset daerah menggunakan SIPKD	12 Dokumen	100.000.000	
101	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
51	Penyusunan dokumen pelaporan evaluasi dan pelaporan internal BPMPT (IKU, IKK, LPPD, LKIP, Lap. Bulanan, Lap. Triwulanan, dan Lap. Tahunan)	Kota Bandung	Tersusunnya Dokumen pelaporan evaluasi dan pelaporan internal BPMPT (IKU, IKK, LPPD, LKIP, Lap. Bulanan, Lap. Triwulanan, dan Lap. Tahunan)	10 Dokumen	104.500.000	Penyusunan dokumen pelaporan evaluasi dan pelaporan internal BPMPT (IKU, IKK, LPPD, LKIP, Lap. Bulanan, Lap. Triwulanan, dan Lap. Tahunan)	Kota Bandung	Tersusunnya Dokumen pelaporan evaluasi dan pelaporan internal BPMPT (IKU, IKK, LPPD, LKIP, Lap. Bulanan, Lap. Triwulanan, dan Lap. Tahunan)	10 Dokumen	104.500.000	
102	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur					Program Pengembangan Kompetensi Aparatur					
52	Pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur melalui Bimtek, Diklat Teknis, Diklat Struktural, Diklat	Kota Bandung	Terselenggaranya Bimtek, Diklat Teknis, Diklat Struktural, Diklat Fungsional	137 orang	300.000.000	Pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur melalui Bimtek, Diklat Teknis, Diklat Struktural, Diklat	Kota Bandung	Terselenggaranya Bimtek, Diklat Teknis, Diklat Struktural, Diklat Fungsional	137 orang	300.000.000	

			Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					_
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fungsional, in house training, seminar dan pelatihan					Fungsional, in house training, seminar dan pelatihan					
103	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur					
53	Capacity building BPMPT Prov. Jawa Barat	Jawa Barat	Terselenggaranya Outbond BPMPT Prov. Jawa Barat	150 orang	145.000.000	Capacity building BPMPT Prov. Jawa Barat	Jawa Barat	Terselenggaranya Outbond BPMPT Prov. Jawa Barat	150 orang	145.000.000	
54	Pembinaan mental spritual	Jawa Barat	Terselenggaranya Pembinaan mental spritual	150 orang	145.000.000	Pembinaan mental spritual	Jawa Barat	Terselenggaranya Pembinaan mental spritual	150 orang	145.000.000	
55	Pembelian pakaian dinas dan seragam olah raga	Kota Bandung	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan seragam olahraga	150 orang	360.000.000	Pembelian pakaian dinas dan seragam olah raga	Kota Bandung	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan seragam olahraga	150 orang	360.000.000	
56	Pembinaan Jasmani	Kota Bandung	Terakomodirnya kegiatan olahraga dan sewa lapanan	12 bulan	78.000.000	Pembinaan Jasmani	Kota Bandung	Terakomodirnya kegiatan olahraga dan sewa lapanan	12 bulan	78.000.000	
57	Pembelian obat- obatan	Kota Bandung	Tersedianya fasilitas obat-obatan	12 bulan	56.161.500	Pembelian obat- obatan	Kota Bandung	Tersedianya fasilitas obat-obatan	12 bulan	56.161.500	
58	Bimbingan Kerohanian (Ceramah keagamaan dan baca tulis al-qur'an)	Kota Bandung	Terselenggaranya Pengajian dan ceramah keagamaan	150 orang	26.500.000	Bimbingan Kerohanian (Ceramah keagamaan dan baca tulis al-qur'an)	Kota Bandung	Terselenggaranya Pengajian dan ceramah keagamaan	150 orang	26.500.000	
109	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur					
59	Pemeliharaan Gedung Kantor	Kota Bandung	Terpenuhinya Pemeliharan Gedung Kantor (Taman, halaman, area parkir	12 bulan	647.237.500	Pemeliharaan Gedung Kantor	Kota Bandung	Terpenuhinya Pemeliharan Gedung Kantor (Taman, halaman, area parkir	12 bulan	647.237.500	

			Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			gedung, billboard, instalasi jaringan, saluran air dan listrik)					gedung, billboard, instalasi jaringan, saluran air dan listrik)			
60	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bandung	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	12 bulan	80.500.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bandung	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	12 bulan	80.500.000	
61	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Kota Bandung	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	241.900.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Kota Bandung	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	241.900.000	
62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peral atan Kantor	Kota Bandung	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	12 Bulan	383.100.000	Pemeliharaan Perlengkapan/Peral atan Kantor	Kota Bandung	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	12 Bulan	383.100.000	
110	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
63	Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Bengkel				20.000.000	Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Bengkel				20.000.000	
64	Pengadaan Peralatan Kantor				212.500.000	Pengadaan Peralatan Kantor				212.500.000	
65	Pengadaan Perlengkapan Kantor				65.750.000	Pengadaan Perlengkapan Kantor				65.750.000	
66	Pengadaan Komputer				778.350.000	Pengadaan Komputer				778.350.000	
67	Pengadaan Mebeuler				463.200.000	Pengadaan Mebeuler				663.200.000	
68	Pengadaan Peralatan Dapur				9.250.000	Pengadaan Peralatan Dapur				9.250.000	
69	Pengadaan alat-alat studio				171.450.000	,				171.450.000	
70	Pengadaan alat-alat komunikasi				81.500.000					81.500.000	

		Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	DED gedung kantor BPMPT (JI. Sumatera No. 50 Bandung)	Kota Bandung	Tersedianya dokumen rencana pembangunan gedung kantor	1 Dokumen	1.200.000.000	DED gedung kantor BPMPT (JI. Sumatera No. 50 Bandung)	Kota Bandung	Tersedianya dokumen rencana pembangunan gedung kantor	1 Dokumen	1.200.000.000	
111	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
72	Pembayaran Jasa Kantor (Listrik, Telepon, Internet)	Kota Bandung	Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional organisasi dalam mendukung Tupoksinya (Listrik, telepon, internet)	12 Bulan	802.200.000	Pembayaran Jasa Kantor (Listrik, Telepon, Internet)				802.200.000	
73	Sewa Perlengkapan, peralatan dan tanaman hias	Kota Bandung	Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional organisasi dalam mendukung Tupoksinya	12 Bulan	101.775.600	Sewa Perlengkapan, peralatan dan tanaman hias				101.775.600	
74	Pengadaan barang cetakan kantor BPMPT	Kota Bandung	Tersedianya barang cetakan kantor	12 Bulan	250.000.000	Pengadaan barang cetakan kantor BPMPT				250.000.000	
75	Penyediaan mamin rapat dan Tamu BPMPT Jawa Barat	Kota Bandung	Terakomodirnya mamin rapat dan tamu BPMPT Prov.Jabar	12 Bulan	550.000.000	Penyediaan mamin rapat dan Tamu BPMPT Jawa Barat				550.000.000	
76	Belanja Alat Tulis Kantor	Kota Bandung	Terakomodirnya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	230.000.000	Belanja Alat Tulis Kantor				230.000.000	
77	Penyediaan Alat rumah tangga	Kota Bandung	Terakomodirnya kebutuhan alat rumah tangga	3 kali	45.000.000	Penyediaan Alat rumah tangga				45.000.000	
78	Belanja barang pakai habis (Dokumentasi, publikasi, dekorasi, cinderamata, plakat dan alat listrik)	Kota Bandung	Terakomodirnya kebutuhan belanja barang habis pakai	12 Bulan	115.500.000	Belanja barang pakai habis (Dokumentasi, publikasi, dekorasi, cinderamata, plakat dan alat listrik)				115.500.000	

		Rancangan Awal RKPD			0.4.4						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Penyediaan jasa surat, pengiriman barang dan benda pos	Kota Bandung	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat dan benda pos	12 Bulan	48.000.000	Penyediaan jasa surat, pengiriman barang dan benda pos	Kota Bandung	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat dan benda pos	12 Bulan	48.000.000	
80	Penyediaan jasa front office dan pengemudi	Kota Bandung	Terpenuhinya kebutuhan jasa front office dan pengemudi	13 Bulan	341.502.200	Penyediaan jasa front office dan pengemudi	Kota Bandung	Terpenuhinya kebutuhan jasa front office dan pengemudi	13 Bulan	341.502.200	
81	Penyediaan tenaga teknis perizinan	Kota Bandung	Terpenuhinya kebutuhan jasa tenaga teknis perizinan	13 Bulan	170.751.100	Penyediaan tenaga teknis perizinan	Kota Bandung	Terpenuhinya kebutuhan jasa tenaga teknis perizinan	13 Bulan	170.751.100	
82	Penyediaan tenaga pramubakti	Kota Bandung	Terpenuhinya kebutuhan jasa tenaga pramubakti	13 Bulan	170.751.100	Penyediaan tenaga pramubakti	Kota Bandung	Terpenuhinya kebutuhan jasa tenaga pramubakti	13 Bulan	170.751.100	
83	Perjalanan dinas dalam daerah	Jawa Barat	Terakomodirnya perjalanan dinas dalam daerah	1 tahun	988.271.000	Perjalanan dinas dalam daerah	Jawa Barat	Terakomodirnya perjalanan dinas dalam daerah	1 tahun	988.271.000	
84	Perjalanan dinas luar provinsi	Nasional	Terakomodirnya perjalanan dinas luar provinsi	1 tahun	535.000.000	Perjalanan dinas luar provinsi	Nasional	Terakomodirnya perjalanan dinas luar provinsi	1 tahun	535.000.000	
85	Perjalanan dinas luar negeri	Luar Negeri	Terakomodirnya perjalanan dinas luar negeri	2 orang	100.000.000	Perjalanan dinas luar negeri	Luar Negeri	Terakomodirnya perjalanan dinas luar negeri	2 orang	100.000.000	
86	Jabar Tolak Kekerasan				200.000.000	Jabar Tolak Kekerasan				200.000.000	
87	Belanja Alat Listrik				48.000.000	Belanja Alat Listrik				48.000.000	
88	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih				115.200.000	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih				115.200.000	
89	Penyediaan bahan bakar minyak/ gas				190.000.000	Penyediaan bahan bakar minyak/ gas				190.000.000	
90	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran dan tabung gas				19.000.000	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran dan tabung gas				19.000.000	

No		Rancangan Awal RKPD		_							
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Advokasi Penyelesaian permasalahan penanaman modal dan perizinan (tenaga tim advokasi)					Advokasi Penyelesaian permasalahan penanaman modal dan perizinan (tenaga tim advokasi)				300.000.000	
98	Kajian Pengembangan Pusat Layanan Promosi dan Investasi di Luar Jawa Barat					Kajian Pengembangan Pusat Layanan Promosi dan Investasi di Luar Jawa Barat				75.000.000	

Secara umum program yang akan dilaksanakan BPMPT pada tahun anggaran 2017 sebagaimana dalam rancangan awal RKPD telah dapat menjawab isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPMPT serta telah sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 serta Renstra BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2018.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan tugas pokok BPMPT yaitu sebagai lembaga yang ditugasi untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang promosi dan penanaman modal, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan sangat sedikit yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, program dan kegiatan yang dilaksanakan BPMPT hanya berhubungan dengan pelaku usaha dan investor yang menanamkan investasinya di Jawa Barat sehingga dalam kegiatan Musrenbang tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Usulan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017 hanya berasal dari PDKPM di Provinsi Jawa Barat dan sudah terakomodir dalam rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 yang mempunyai tema "Memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat" mempunyai 4 (empat) isu strategis, yaitu :

- 1. Peningkatan daya saing :
 - a. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha
 - b. Percepatan pembangunan infrastruktur
 - c. Peningkatan pembangunan industry di berbagai koridor ekonomi
 - d. Penciptaan kesempatan kerja, khususnya tenaga kerja muda
- 2. Peningkatan daya tahan ekonomi:
 - a. Peningkatan ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras10 juta ton
 - b. Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energy.
- 3. Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat :
 - a. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia
 - b. Perecepatan pengurangan kemiskinan: klaster 1 4
- 4. Pemantapan stabilitas sosial politik:
 - a. Perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan koperasi
 - b. Percepatan pembangunan minim essential Force

Strategi yang dilaksanakan pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha pada tahun 2016 diantaranya adalah :

- a. Penyerdehanaan prosedur investasi dan prosedur berusaha;
- b. Peningkatan efisiensi logistik nasional;
- c. Pengembangan kawasan ekonomi khusus;
- d. Harmonisasi kebijakan ketenagakerjaan.

Sasaran yang ingin dicapai pemerintah dalam peningkatan iklim investasi dan iklim usaha di tahun 2016 adalah :

- a. Meningkatnya investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 11, 1 %
- b. Meningkatnya tingkat kemudahan berusaha (ease of doing business):

• Waktu untuk memulai usaha : 20 hari

Perijinan mendirikan bangunan : 137 hari

• Perolehan listrik: 90 hari

Pendaftaran property : 20 hari

Arah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam iklim investasi dan iklim usaha pada tahun 2015, diantaranya adalah :

- 1. Penyederhanaan dan percepatan prosedur investasi dan prosedur berusaha, dengan biaya yang lebih efisien dan transparan;
- Penyederhanaan aturan terkait implementasi proyek-proyek KPS;
- Peningkatan efisiensi sistem logistik nasional, melalui perluasan pelaksanaan National Single Window (NSW) serta pengembangan jalur dan sarana distribusi;
- Pengembangan kawasan ekonomi khusus di koridor-koridor ekonomi yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi sebagai penampung kegiatan industri, ekspor-impor, dan kegiatan ekonomi lainnya;
- 5. Peningkatan iklim ketenagaan dan hubungan industrial, melalui : harmonisasi peraturan ketenagakerjaan dengan sinergi kebijakan pusat dan daerah, meningkatkan kemampuan negosiasi bagi serikat pekerja dan pengusaha, memperkuat kerjasama tripartit di daerah, serta meningkatkan profesionalisme ahli-ahli hubungan industrial dan hakim pengadilan hubungan industrial.

Berdasarkan sasaran ekonomi makro, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 6,3 % sedangkan pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar 6,9 %. Sementara laju inflasi pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 6,3 % dan pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar 4,0 %. Pada tahun 2016 pertumbuhan Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) ditargetkan sebesar 13,99 % dan pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar 18,02 %. Sehingga kebutuhan investasi pada tahun 2016 sebesar Rp. 412,30 Trilyun dan pada tahun 2017 dibutuhkan investasi sebesar Rp. 267,2 Trilyun.

Berdasarkan rincian proyeksi gambaran persebaran realisasi penanaman modal tahun 2014 – 2019 yang disusun BKPM Republik Indonesia, pada tahun 2016 Provinsi Jawa Barat realisasi investasinya ditargetkan sebesar Rp. 121,8 Trilyun dan pada tahun 2017 diproyeksikan

realisasi investasinya sebesar Rp. 138,85 Trilyun. Melihat realisasi investasi di Jawa Barat pada tahun 2015 dan stabilitas ekonomi di Indonesia dan Provinsi Jawa Barat kiranya target realisasi ini akan dapat tercapai.

BKPM Republik Indonesia mempunyai visi "Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional". Untuk mewujudkan visi tersebut, dilaksanakan melalui 3 (tiga) misi yaitu :

- 1. Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal;
- 2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal;
- 3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

Untuk menunjang visi dan misi tersebut, BKPM mempunyai sasaran strategis sebagai berikut :

- Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional yang berorientasi pada kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal;
- 2. Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektivitas kegiatan promosi yang tepat sasaran;
- 3. Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang penanaman modal;
- 4. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah, dan pemberdayaan usaha nasional;
- 5. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas daerah;
- 6. Meningkatnya kerjasama di bidang penanaman modal;
- 7. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPMPT

Visi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat merupakan komitmen yang diharapkan mampu memotivasi segenap anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan gambaran kedepan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013-2018).

Adapun Visi BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2018 adalah : "Menjadi Lembaga Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan yang Andal dan Profesional" Pengertian dalam Visi Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat adalah :

- Andal dalam visi tersebut menunjukkan bahwa BPMPT Jabar dalam menyelenggarakan pelayanan penanaman modal dan perizinan akan senantiasa mengedepankan asas-asas pelayanan publik yang mengutamakan ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, akuntabilitas, keterbukaan dan juga menghasilkan perizinan yang akurat dan mengandung kekuatan hukum.
- Profesional dalam visi tersebut menunjukkan bahwa BPMPT Jabar senantiasa menampilkan kinerja terbaik dengan mengutamakan kepuasan masyarakat dalam melayani pelayanan penanaman modal dan administrasi perizinan di Jawa Barat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Misi Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat ditetapkan untuk mendukung dan mewujudkan Misi Provinsi Jawa Barat, yaitu :

- Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Dalam Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan.
- Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Yang Cepat, Tepat, Akurat,
 Transparan, Normatif dan Akuntabel untuk Kepuasan Masyarakat.
- Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinassi PelayananPenanaman Modal dan Perizinan untuk mendorong peningkatan Investasi di Jawa Barat.
- Sarana Pelayanan serta Kualitas Data Investasi dan Perizinan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai bahan Kebijakan.
- Sinergitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan dengan Pemangku Kepentingan untuk mendorong peningkatan berusaha di Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas dilakukan melalui pengembangan industri input untuk memperkuat sisi hilir dan meningkatkan nilai tambah dan produktivitas baik di kegiatan agribisnis maupun industri pengolahan. Peningkatan kemitraan antar usaha kecil dan menengah dan jejaringnya merupakan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Penguasaan teknologi informasi yang didukung pembangunan infrastruktur wilayah yang strategis merupakan upaya akselerasi perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Misi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode tahun 2013 - 2018 berdasarkan urusan pemerintahan. Sejalan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan, kebijakan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat, fokus kepada Misi 2 dan Misi 3 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -2018.

Misi 1 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penanaman Modal.

Kebijakan : memberikan fasilitas bagi upaya peningkatan promosi dan kerjasama penanaman modal

Misi 2: Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Pelayanan.

Kebijakan : meningkatkan sumber daya aparatur, daya dukung, sarana prasarana, dan pendanaan dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dari faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi kemudian ditetapkan tujuan organisasi yang harus diraih sampai dengan tahun 2018. Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan ditetapkan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Berdasarkan misi yang telah dirumuskan, tujuan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai berikut:

- Meningkatkan pengetahuan dan fasilitas penanaman modal agar timbul dan berkembang sesuai dengan kebutuhan perekonomian Jawa Barat;
- Meningkatkan sumber daya aparatur, daya dukung, sarana prasarana dan pendanaan dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat;

Dari tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat menjadi dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerjanya sehingga merupakan alat

pemicu supaya semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai dan untuk itulah telah ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya volume dan nilai penanamnan modal di Jawa Barat berdasarkan kebijakan yang efisien dan efektif serta berwawasan lingkungan;
- 2. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan disiplin SDM aparatur;
- 3. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2017 Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat melaksanakan 12 (dua belas) program yang diterjemahkan dalam 74 (tujuh puluh empat) kegiatan.

Program yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- 1. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
- 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 3. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
- 4. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
- 5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 8. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 9. Program Peningkatan Investasi Daerah
- 10. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- 12. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Dari program tersebut diurai melalui sejumlah kegiatan. Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang telah dibuat oleh organisasi, dengan kata lain program merupakan kumpulan dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan memiliki dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan dari kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan

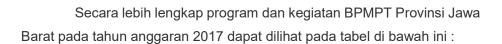
untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional instansi yang berdimensi 5 (lima) tahunan.

Kegiatan Pokok Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari program kerja tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Penatausahaan keuangan dan aset daerah
- Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Aparatur Melalui Bintek,
 Diklat Teknis, Diklat Struktural, Diklat Fungsional dan InHouse Training
- 4. Kegiatan Capacity Building BPMPT Provinsi Jawa Barat
- 5. Kegiatan Pembelian Pakaian Dinas
- 6. Kegiatan Pembinaan Jasmani
- 7. Kegiatan Pembelian Obat-Obatan
- 8. Kegiatan Bimbingan Kerohanian (Ceramah Keagamaan dan Baca Tulis Al-Qur'an)
- 9. Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor
- 10. Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan
- 11. Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
- 12. Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Kantor
- 13. Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel
- 14. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor
- 15. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor
- 16. Pengadaan Komputer dan Printer
- 17. Kegiatan Pengadaan Meubeulair
- 18. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Studio
- 19. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
- 20. Kegiatan Pengadaan Instalasi Listrik
- 21. Kegiatan Penyusunan DED Gedung Kantor BPMPT
- 22. Kegiatan Pembayaran Jasa Kantor
- 23. Kegiatan Perlengkapan, Peralatan dan Tanaman Hias
- 24. Kegiatan Pengadaan Barang Cetakan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Makan Minum Rapat, Tamu, Olahraga dan Hari Besar Agama BPMPT Provinsi Jawa Barat
- 26. Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor

- 27. Kegiatan Penyediaan Alat Rumah Tangga
- Kegiatan Belanja Barang Pakai Habis (Dokumentasi, Publikasi,
 Dekorasi, Cinderamata, Plakat dan Alat Listrik)
- 29. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat, Pengiriman Barang dan Benda POS
- 30. Kegiatan Penyediaan Jasa Front Office dan Pengemudi
- 31. Kegiatan Penyediaan Tenaga Teknis Perizinan
- 32. Kegiatan Penyediaan Tenaga Pramubakti
- 33. Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- 34. Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Provinsi
- 35. Kegiatan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas, dan Tabung Pemadam Kebakaran
- 37. Kegiatan Penyediaan Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan
- 38. Kegiatan Penyediaan Tenaga Pemeliharaan Website dan Jaringan
- Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP dan Updating Website
- 40. Kegiatan Pengembangan Aplikasi SIMPATIK Terintegrasi dengan Tim Teknis
- 41. Kegiatan Pengembangan Sistem Call Centre Pelayanan Perizinan
- Kegiatan Penyusunan Potensi Sumber Daya Penanaman Modal di 1
 Wilayah Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat
- 43. Kegiatan Pelaksanaan Matchmaking, Business Meeting dan MPU
- 44. Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan Bahan Promosi (Desain dan Cetak)
- 45. Kegiatan Pelaksanaan Event Promosi Dalam Negeri
- 46. Pelaksanaan Event Promosi Luar Negeri
- 47. Pelaksanaan Kerjasama Sister Provence dengan Australia Selatan
- 48. Kegiatan Pembuatan Cinderamata Promosi Investasi Dalam dan Luar Negeri
- 49. Kegiatan Publikasi Kawasan Geopark Ciletuh
- 50. Kegiatan Pembinaan PMA/PMDN Atas Kewajiban LKPM
- 51. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Proyek Investasi
- 52. Kegiatan Penanganan Permasalahan Penanaman Modal dan Perijinan
- 53. Kegiatan Pembuatan bahan/ Data Cetakan Sosialisasi Pelayanan Perizinan

- 54. Kegiatan Pembuatan/Produksi Audio Visual untuk Ilm di Radio dan TV
- 55. Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Perizianan
- 56. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Proses Penertiban Perijinan
- 57. Kegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Perijinan
- 58. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pasca Penertiban Perijinan
- 59. Kegiatan Pelaksanaan peninjauan lapangan bersama Tim Teknis Bid Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial
- 60. Kegiatan Pelaksanaan peninjauan lapangan bersama Tim Teknis Bid Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- Kegiatan Pelaksanaan Rapat Teknis Untuk Kajian Teknis Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial
- 62. Kegiatan Pelaksanaan Rapat Teknis Untuk Kajian Teknis Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- 63. Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial
- 64. Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- 65. Kegiatan Penyusunan Updating Persyaratan Perizinan Infrastruktur dan Sosial
- 66. Kegiatan Penyusunan Updating Persyaratan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- 67. Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Perizinan di Gerai SMS
- Kegiatan Pengumpulan data Realisasi Perijinan dan Penyerapan Tenaga
 Kerja
- 69. Kegiatan Evaluasi Data, Pelaporan Investasi dan Perijinan
- 70. Kegiatan Penyelenggaraan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- Kegiatan Penyelenggaraan Forum Perencanaan Tingkat Daerah (Pra Musrenbang, Musrenbang, Musrenbangnas, Pertemuan regional dan nasional)
- 72. Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan BPMPT
- 73. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 2018
- Penyelenggaraan Pameran Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ)





Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018 BPMPT Provinsi Jawa Barat

	Urusan/Bidang			Rencana T	ahun 2017			Prakiraan Maju Rend	cana Tahun 2018
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.18.16	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran		100 %	100,000,000.00	APBD		100 %	
1.18.16.01	Penatausahaan keuangan dan aset daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan	Jawa Barat dan Luar Jawa Barat	12 Dokumen	100,000,000.00	APBD		12 Dokumen	200.000.000
1.18.16	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan		100 %	100,000,000.00	APBD		100 %	
1.18.16.01	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen yang Dihasilkan	Kota Bandung	8 (Delapan) dokumen	100,000,000.00	APBD		8 dokumen	200.000.000
1.18.16	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	Jumlah PNS Pemprov jabar yang Iulus Diklat dengan predikat minimal memuaskan		720 orang	250,000,000.00	APBD		1 dokumen	2.750.000.000
1.18.16.01	Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Aparatur Melalui Bintek,	Jumlah Aparatur Dinas PMPTSP yang Lulus Diklat dengan Predikat Minimal Memuaskan	Kota Bandung	100 %	250,000,000.00	APBD		100 %	400.000.000

	Urusan/Bidang			Rencana T	ahun 2017			Prakiraan Maju Renca	na Tahun 2018
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Diklat Teknis, Diklat Struktural, Diklat Fungsional dan InHouse Training								
1.18.16	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang- undangan		100 %	513,811,500.00	APBD		100 %	1.518.323.000
1.18.16.01	Kegiatan Capacity Building BPMPT Provinsi Jawa Barat	Terselenggaranya Outbond BPMPT Prov. Jawa Barat	Kota Bandung	1 kali	145,000,000.00	APBD		1 kali	290.000.000
1.18.16.01	Kegiatan Pembelian Pakaian Dinas	Jumlah Aparatur yang kebutuhan kesejahteraanya terpenuhi	Kota Bandung	139 Orang	208,150,000.00	APBD		150 Orang	900.000.000
1.18.16.01	Kegiatan Pembinaan Jasmani	Terakomodirnya kegiatan olahraga dan sewa lapanan	Kota Bandung	Kebutuhan Pembinaan Jasmani , dan Sewa Tempat Olahraga selama 1 tahun	78,000,000.00	APBD		150 Orang	156.000.000
1.18.16.01	Kegiatan Pembelian Obat- Obatan	Tersedianya fasilitas obat-obatan	Kota Bandung	Tersedianya Kebutuhan Obat- obatan selama 1 tahun	56,161,500.00	APBD		Tersedianya Kebutuhan Obat- obatan selama 1 tahun	112.323.000
1.18.16.01	Kegiatan Bimbingan Kerohanian (Ceramah Keagamaan dan Baca Tulis Al- Qur'an)	Terselenggaranya Pengajian dan ceramah keagamaan	Kota Bandung	1 tahun	26,500,000.00	APBD		1 tahun	60.000.000

	Urusan/Bidang			Rencana T	ahun 2017			Prakiraan Maju Renca	na Tahun 2018
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.18.16	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB			1,230,500,000.00	APBD		100 %	2.461.000.000
1.18.16.01	Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharan Gedung Kantor (Taman, halaman, area parkir gedung, billboard, instalasi jaringan, saluran air dan listrik)	Jawa Barat	Pemeliharaan gedung dan bangunan; pemeliharaan instalasi jaringan; pemeliharaan halaman/taman/p ekarangan /halaman; pemeliharaan bangunan bukan gedung	600,000,000.00	APBD		Pemeliharaan gedung dan bangunan; pemeliharaan instalasi jaringan; pemeliharaan halaman/taman/pekara ngan /halaman; pemeliharaan bangunan bukan gedung	1.200.000.000
1.18.16.01	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Jawa Barat	Perawatan Kendaraan Bermotor (servis dan pelumasan)	84,700,000.00	APBD		Perawatan Kendaraan Bermotor (servis dan pelumasan)	169.400.000
1.18.16.01	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya updating	Jawa Barat	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (servis dan pelumasan)	200,000,000.00	APBD		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (servis dan pelumasan)	400.000.000
1.18.16.01	Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan/Pera Iatan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan/peralata n kantor	Jawa Barat	Pemeliharaan Peralatan/perleng kapan kantor (meubeulair kantor, AC, Komputer/Printer/ Laptop&peralatan IT lainnya, Mesin	345,800,000.00	APBD		Pemeliharaan Peralatan/perlengkapa n kantor (meubeulair kantor, AC, Komputer/Printer/Lapt op&peralatan IT lainnya, Mesin Fotocopy, PABX &	691.600.000

	Urusan/Bidang			Rencana T	ahun 2017			Prakiraan Maju Renca	na Tahun 2018
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Fotocopy, PABX & Telepon, CCTV, Genset, Mesin IKM & Antrian, TV, Jet Pump, Mesin Absen, Mesin TIK) dan Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi				Telepon, CCTV, Genset, Mesin IKM & Antrian, TV, Jet Pump, Mesin Absen, Mesin TIK) dan Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi	
1.18.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur		100 %	2,663,950,000.00	APBD		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur	2.946.501.200
1.18.16.01	Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	Terpenuhinya Kebutuhan alat-alat bengkel	Kota Bandung		15,000,000.00	APBD			32.000.000
1.18.16.01	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan peralatan kantor	Kota Bandung		170,125,000.00	APBD			340.250.000
1.18.16.01	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan perlengkapan kantor	Kota Bandung		70,600,000.00	APBD			143.551.200
1.18.16.01	Pengadaan Komputer dan Printer	Terpenuhinya kebutuhan computer dan printer	Jawa Barat		195,100,000.00	APBD			390.200.000
1.18.16.01	Kegiatan Pengadaan Meubeulair	Terpenuhinya kebutuhan mebelair	Kota Bandung		314,100,000.00	APBD			700.000.000
1.18.16.01	Kegiatan Pengadaan Alat- Alat Studio	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat studio	Kota Bandung		126,125,000.00	APBD			252.250.000

	Urusan/Bidang			Rencana T	ahun 2017			Prakiraan Maju Rend	cana Tahun 2018
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.18.16.01	Kegiatan Pengadaan Alat- Alat Komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat komunikasi	Kota Bandung		84,000,000.00	APBD			168.000.000
1.18.16.01	Kegiatan Pengadaan Instalasi Listrik	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan instalasi listrik	Prov.Jawa Barat	1 paket	539,700,000.00	APBD		1 paket	500.000.000
1.18.16.01	Kegiatan Penyusunan DED Gedung Kantor BPMPT	Tersedianya dokumen rencana pembangunan gedung kantor	Kota Bandung	1 dokumen	1,149,200,000.00	APBD			
1.18.16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya		100 %	5,496,838,500.00	APBD		100%	10.440.852.000
1.17.66.01	Kegiatan Pembayaran Jasa Kantor	Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional organisasi dalam mendukung Tupoksinya (Listrik, telepon, internet)	Kota Bandung	12 bulan	806,500,000.00	APBD		12 bulan	1.613.000.000
1.18.16.01	Kegiatan Perlengkapan, Peralatan dan Tanaman Hias	Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional organisasi dalam mendukung Tupoksinya	Kota Bandung	1 tahun	71,775,600.00	APBD		1 tahun	143.551.200
1.18.16.01	Kegiatan Pengadaan Barang Cetakan Kantor	Tersedianya barang cetakan kantor	Kota Bandung	12 bulan	434,420,400.00	APBD		12 bulan	868.840.800
1.18.16.01	Kegiatan Penyediaan Makan Minum Rapat, Tamu, Olahraga	Terakomodirnya mamin rapat dan tamu BPMPT Prov.Jabar	Kota Bandung	12 bulan	456,000,000.00	APBD		12 bulan	912.000.000

	Urusan/Bidang			Rencana T	ahun 2017			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Hari Besar Agama BPMPT Provinsi Jawa Barat								
1.18.16.01	Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor	Terakomodirnya kebutuhan alat tulis kantor	Kota Bandung	12 bulan	200,000,000.00	APBD		12 bulan	400.000.000
1.18.16.01	Kegiatan Penyediaan Alat Rumah Tangga	Terakomodirnya kebutuhan alat rumah tangga	Kota Bandung	1 tahun	45,000,000.00	APBD		1 tahun	90.000.000
1.18.16.01	Kegiatan Belanja Barang Pakai Habis (Dokumentasi, Publikasi, Dekorasi, Cinderamata, Plakat dan Alat Listrik)	Terakomodirnya kebutuhan belanja barang habis pakai	Kota Bandung	12 bulan	115,000,000.00	APBD		12 bulan	230.000.000
1.18.16.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat, Pengiriman Barang dan Benda POS	Tersedianya kebutuhan Jasa paket Pengiriman dan Materai selama 1 tahun	Kota Bandung	12 bulan	21,600,000.00	APBD		12 bulan	43.200.000
1.18.16.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Front Office dan Pengemudi	Terpenuhinya kebutuhan jasa front office dan pengemudi	Kota Bandung	1 tahun	245,700,000.00	APBD		1 tahun	307.125.000
1.18.16.01	Kegiatan Penyediaan Tenaga Teknis Perizinan	Terpenuhinya kebutuhan jasa tenaga teknis perizinan	Kota Bandung	1 tahun	573,300,000.00	APBD		1 tahun	716.625.000
1.18.16.01	Kegiatan Penyediaan Tenaga Pramubakti	Terpenuhinya kebutuhan jasa tenaga pramubakti	Kota Bandung	1 tahun	81,900,000.00	APBD		1 tahun	255.937.500

	Urusan/Bidang			Rencana T	ahun 2017			Prakiraan Maju Renca	ana Tahun 2018
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.18.16.01	Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Terakomodirnya perjalanan dinas dalam daerah	Kota Bandung	1 tahun	833,737,500.00	APBD		1 tahun	1.667.475.000
1.18.16.01	Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Provinsi	Terakomodirnya perjalanan dinas luar provinsi	Kota Bandung	1 tahun	526,705,000.00	APBD		1 tahun	1.053.410.000
1.18.16.01	Kegiatan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	Jawa Barat	1 tahun	115,200,000.00	APBD		1 tahun	230.400.000
1.18.16.01	Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas, dan Tabung Pemadam Kebakaran	Tersedianya Kebutuhan Bahan Bakar Minyak/ Gas	Jawa Barat	1 tahun	151,000,000.00	APBD		1 tahun	302.000.000
1.18.16.01	Kegiatan Penyediaan Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan	Tersedianya Kebutuhan Tenaga Kebersihan dan Keamanan	Kota Bandung	1 tahun	778,050,000.00	APBD		1 tahun	1.556.100.000
1.18.16.01	Kegiatan Penyediaan Tenaga Pemeliharaan Website dan Jaringan	Tersedianya Kebutuhan Tenaga Pemeliharaan Website dan Jaringan	Kota Bandung	1 tahun	40,950,000.00	APBD		1 tahun	51.187.500
1.18.16	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat			650,000,000.00	APBD			1.950.000.000

	Urusan/Bidang			Poncono T	ahun 2017			Prakiraan Maju Renca	no Tohun 2019
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.18.16.01	Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP dan Updating Website	Tersedianya Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP dan Updating website	Bandung	3 aplikasi	200,000,000.00	APBD		3 aplikasi	600.000.000
1.18.16.01	Kegiatan Pengembangan Aplikasi SIMPATIK Terintegrasi dengan Tim Teknis	Terakomodirnya pengembangan aplikasi SIMPATIK	Bandung	2 aplikasi	200,000,000.00	APBD		2 aplikasi	600.000.000
1.18.16.01	Kegiatan Pengembangan Sistem Call Centre Pelayanan Perizinan	Tersedianya Sistem Call Center Pelayanan Perizinan	Bandung	1 Sistem Call Center	250,000,000.00	APBD		1 Sistem Call Center	750.000.000
1.18.16	Program Peningkatan Investasi Daerah	Nilai Investasi PMA/PMDN			3,365,800,000.00	APBD			9.048.940.000
1.18.16.01	Kegiatan Penyusunan Potensi Sumber Daya Penanaman Modal di 1 Wilayah Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat	Meningkatnya Iklim Investasi	Jawa Barat	3 dokumen	436,500,000.00	APBD		3 dokumen	836.500.000
1.18.16.01	Kegiatan Pelaksanaan Matchmaking, Business Meeting dan MPU	Meningkatnya Kerjasama Investasi dan Fasilitasi Pelaku Usaha	Kota Bandung	2 kali	237,625,000.00	APBD		2 kali	517.625.000
1.18.16.01	Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan Bahan	Tersedianya bahan promosi (desain dan cetak)	Kabupaten Kota se- Jawa Barat	1 paket	150,000,000.00	APBD		1 paket	450.000.000

	Urusan/Bidang			Rencana T	ahun 2017			Prakiraan Maiu Renc	aju Rencana Tahun 2018	
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Promosi (Desain dan Cetak)									
1.18.16.01	Kegiatan Pelaksanaan Event Promosi Dalam Negeri	Terlaksananya Kegiatan Promosi Investasi di dalam negeri	Jakarta	4 kali	470,000,000.00	APBD		4 kali	950.000.000	
1.18.16.01	Pelaksanaan Event Promosi Luar Negeri	Terlaksananya Kegiatan Promosi Investasi ke Wilayah Eropa	Eropa	4 kali	550,000,000.00	APBD		4 kali	2.600.000.000	
1.18.16.01	Pelaksanaan Kerjasama Sister Provence dengan Australia Selatan	Terlaksananya kerjasama Sister Province dengan Australia Selatan	Australia Selatan	1 kali	350,000,000.00	APBD		1 kali	350.000.000	
1.18.16.01	Kegiatan Pembuatan Cinderamata Promosi Investasi Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya pembuatan cinderamata promosi investasi dalam dan luar negeri	Bandung	1 paket	100,000,000.00	APBD		1 paket	100,000,000.00	
1.18.16.01	Kegiatan Publikasi Kawasan Geopark Ciletuh	Terlaksananya publikasi melalui media audio visual, media social, iklan layanan masyarakat dan talk show	Kabupaten Sukabumi	12 bulan	150,000,000.00	APBD		12 bulan	650.000.000	
1.18.16.01	Kegiatan Pembinaan PMA/PMDN Atas Kewajiban LKPM	Terwujudnya pembinaan PMA/PMDN akan kewajiban LKPM	Jawa Barat	1 tahun	288,970,000.00	APBD		1 tahun	918.480.000	
1.18.16.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Proyek Investasi	Terealisasinya laporan pelaksanaan pengawasan proyek investasi	Jawa Barat	27 Kab/Kota,90 Proyek/ Perusahaan, 14 Orang	320,095,000.00	APBD		27 Kab/Kota,90 Proyek/ Perusahaan, 14 Orang	1.003.195.000	
1.18.16.01	Kegiatan Penanganan	Jumlah Fasilitasi Penanganan	Jawa Barat	150 Orang, 2 Kali	312,610,000.00	APBD		150 Orang, 2 Kali 140 permasalahan	773.140.000	

	Urusan/Bidang			Rencana T	ahun 2017			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Permasalahan Penanaman Modal dan Perijinan	Permasalahan bagi Perusahaan PMA/PMDN		140 permasalahan 1 Kali, 8 Orang Kab/Kota				1 Kali, 8 Orang Kab/Kota		
1.18.16	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat			3,114,520,000.00	APBD			10,004,030.000	
1.18.16.01	Kegiatan Pembuatan bahan/ Data Cetakan Sosialisasi Pelayanan Perizinan	Terinformasikannya syarat-syarat perijinan dalam bentuk cetakan flyer, booklet, buku dan brosur	Kota Bandung	4 paket	166,050,000.00	APBD		4 paket	166.050.000	
1.18.16.01	Kegiatan Pembuatan/Produk si Audio Visual untuk Ilm di Radio dan TV	Terselenggaranya ILM mengenai pelayanan perizinan Prov.Jabar di radio dan TV	Kota Bandung	Tersosialisasikann ya Perijianan melalui Audio Visual	80,000,000.00	APBD		Tersosialisasikannya Perijianan melalui Audio Visual	500.000.000	
1.18.16.01	Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Perizinan	Tersedianya Cetakan bahan sosialisasi (Leaflet, Brosur, dll)	Kota Bandung	- Terpenuhinya pendampingan visitasi lapangan Tim Teknis selama tahun 2017 - Laporan kegiatan Tim Teknis tahun anggaran 2017 - Terpenuhnya kelengkapan fasilitas tim teknis	175,000,000.00	APBD		- Terpenuhinya pendampingan visitasi lapangan Tim Teknis selama tahun 2018 - Laporan kegiatan Tim Teknis tahun anggaran 2018 - Terpenuhnya kelengkapan fasilitas tim teknis	400.000.000	
1.18.16.01	Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Proses	Jumlah data-data teknis perijinan dan non ijin yang terverifikasi	Jawa Barat	100 izin	50,000,000.00	APBD		100 izin	149.655.000	

	Urusan/Bidang			Rencana T	ahun 2017			Prakiraan Maju Renc	ana Tahun 2018
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penertiban Perijinan								
1.18.16.01	Kegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Perijinan	Terselenggaranya survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Jawa Barat	2 kali	100,000,000.00	APBD		2 kali	500.000.000
1.18.16.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pasca Penertiban Perijinan	Jumlah Permasalahan yang Terselesaikan Pasca Pelaksanaan Pengawasan	Jawa Barat	150 perusahaan	88,470,000.00	APBD		225 perusahaan	534.300.000
1.18.16.01	Kegiatan Pelaksanaan peninjauan lapangan bersama Tim Teknis Bid Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial	Jumlah peninjauan Iapangan	Jawa Barat		825,000,000.00	APBD		500 kali	3.500.000.000
1.18.16.01	Kegiatan Pelaksanaan peninjauan lapangan bersama Tim Teknis Bid Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah peninjauan lapangan	Jawa Barat		900,000,000.00	APBD		800 kali	3.404.025.000
1.18.16.01	Kegiatan Pelaksanaan Rapat Teknis Untuk Kajian Teknis Pelayanan	Rekomendasi Teknis	Jawa Barat	120 kali	100,000,000.00	APBD		120 kali	100,000,000.00

	Urusan/Bidang			Rencana T	ahun 2017			Prakiraan Maju Reno	ana Tahun 2018
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perizinan Infrastruktur dan Sosial								
1.18.16.01	Kegiatan Pelaksanaan Rapat Teknis Untuk Kajian Teknis Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Rekomendasi Teknis	Jawa Barat	120 kali	100,000,000.00	APBD		120 kali	100,000,000.00
1.18.16.01	Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial	Koordinasi Tim Teknis Perizinan Bid. INSOS	Jawa Barat	2 kali	50,000,000.00	APBD		2 kali	100,000,000.00
1.18.16.01	Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Koordinasi Tim Teknis Bid. ESDA	Jawa Barat	2 kali	50,000,000.00	APBD		2 kali	100,000,000.00
1.18.16.01	Kegiatan Penyusunan Updating Persyaratan Perizinan Infrastruktur dan Sosial	Terlaksananya updating Persyaratan Perizinan	Jawa Barat	1 dokumen	40,000,000.00	APBD		1 dokumen	175.000.000
1.18.16.01	Kegiatan Penyusunan Updating Persyaratan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya updating Persyaratan Perizinan	Jawa Barat	1 dokumen	40,000,000.00	APBD		1 dokumen	175.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.18.16.01	Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Perizinan di Gerai SMS	Layanan Perizinan di Gerai dan SMS	4 Gerai, 12 Bulan; 350 pemohon/b ulan	3 gerai	350,000,000.00	APBD		3 gerai	500.000.000
1.18.16.01	Program Pengembangan Data/Informasi/Sta tistik Daerah	Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan			734,195,000.00	APBD			1,150,000,000
1.18.16.01	Kegiatan Pengumpulan data Realisasi Perijinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Dokumen Kajian Target	Jawa Barat	1. 27 Kab/Kota 2. 4 Triwulan, 150 Orang x 4 kali 3. 1 Dokumen 4. 300 Buku (Triwulan 4 Tahun 2016, Triwulan I,II,III tahun 2017)	650,000,000.00	APBD		1. 27 Kab/Kota 2. 4 Triwulan, 150 Orang x 4 kali 3. 1 Dokumen 4. 300 Buku (Triwulan 4 Tahun 2017, Triwulan I,II,III tahun 2018)	650,000,000
1.18.16.01	Kegiatan Evaluasi Data, Pelaporan Investasi dan Perijinan	Tersedianya Bahan Evaluasi Manajemen untuk Pengambilan Keputusan	Jawa Barat	1 laporan	84,195,000.00	APBD		1 laporan	500,000,000
1.18.16	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran			505,250,000.00	APBD			1,060,500,000
1.18.16.01	Kegiatan Penyelenggaraan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Terselenggaranya Forum OPD	Jawa Barat dan Luar Jawa Barat	1 kali	150,000,000.00	APBD		1 kali	300.000.000
1.18.16.01	Kegiatan Penyelenggaraan Forum Perencanaan	Jumlah laporan hasil Partisipasi/ keikutsertaan dalam forum perencanaan	Jawa Barat dan Luar Jawa Barat	15 kali	150,000,000.00	APBD		15 kali	300.000.000

	Urusan/Bidang		Rencana Tahun 2017					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tingkat Daerah (Pra Musrenbang, Musrenbang, Musrenbangnas, Pertemuan regional dan nasional)	tingkat regional dan nasional							
1.18.16.01	Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan BPMPT	Kajian Hasil Monitoring dan Evaluasi	Jawa Barat dan Luar Jawa Barat	1 Dokumen	80,250,000.00	APBD		1 Dokumen	160,500,000
1.18.16.01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 2018	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan	Kota Bandung	10 Dokumen	75,000,000.00	APBD		10 Dokumen	150.000.000
1.18.16.01	Penyelenggaraan Pameran Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Pameran LKPJ	Kota Bandung	1 Kegiatan	50,000,000.00	APBD		1 Kegiatan	150.000.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Jawa Barat 2013 – 2018 dan Rencana Strategis BPMPT Tahun 2015 - 2018. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 serta Visi dan Misi BKPM RI dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2015. Renja Tahun 2017 merupakan tahap pemantapan program dan kegiatan prioritas guna mewujudkan Visi dan Misi Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Strategis BPMPT. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari Renja tahun 2017 ini, akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Gubernur serta kinerja BPMPT selama masa 5 (lima) tahun.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja tahun 2017 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2017, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2017. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2017, mengacu pada isuisu penting yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPMPT, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian 10 (sepuluh) tujuan bersama Common Goals dan Non Common Goals. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

 Seluruh Bidang dan Sekretariat pada BPMPT serta PDKPM di Jawa Barat, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2017, secara sinergitas dan terintegrasi.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Bidang dan Sekretariat, Sub Bagian Perencanaan dan Program menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan Renja Tahun 2015. Hasil evaluasi, kajian

- dan analisis Renja Tahun 2015 menjadi dasar bahan penyusunan Renja Tahun 2017 berikutnya.
- Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2017, Renja Tahun 2017 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017.
- 3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas,harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2017, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Kepala Badan, melalui Sub Bagian Perencanaan dan Program serta Sub Bagian Keuangan.
- 4. Secara proaktif, Sub Bagian Perencanaan dan Program, wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan Renja Tahun 2017 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan.
- 5. Pada akhir tahun anggaran 2017, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2017, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala Badan melalui Sub Bagian Perencanaan dan Program serta Sub Bagian Keuangan.
- 6. Renja Tahun 2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat,

DR. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE.
Permbina Utama Madya
NIP. 19601217 198511 1 002